

ANALISA PENGARUH WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Intan Nio Kusumawati, email: Intannio240299@gmail.com
Jurusan Akuntansi STIE Surakarta

Arif Nugroho Rachman, email: arifnugroho.rachman@gmail.com
Jurusan Akuntansi STIE Surakarta

Abstract

The income earned by a country with one of the largest receipts comes from taxes. Taxation as one of the main factors in increasing state revenues so the observance of waib tax must be increased. This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, socialization of taxation, untabilitas pelayanan public and income level in the observance of taxpayers. This research is in order to obtain information and data related to the problem that will be the research material using primary data, namely through the dissemination questionnaire of 100 samples using purposive sampling sample determination method. Data analysis method using multiple linear regression. This study has results on taxpayer awareness, socialization of taxation and income level partially affect taxpayer compliance and accountability of public services partially does not affect taxpayer compliance in SAMSAT Karanganyar Regency. The results of simultaneous research on taxpayer awareness, taxation sociality, public service accountability and income level have a positive influence on taxpayer compliance in SAMSAT Karanganyar Regency.

Keywords: Awareness, Socialization, Public Service Accountability, Income Level, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah yang diperoleh oleh suatu negara yang penerimaan paling besar bersumber dari pajak. Pajak mempunyai fungsi anggaran yaitu pajak sebagai penerimaan kas negara yang kemudian dialokasikan untuk mendanai belanja negara seperti kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan yang akan dilaksanakan akan memerlukan sumber dana yang yang tinggi, sehingga pemerintah harus meningkatkan penerimaan kas negaa dari internal. Target pajak akan meningkat setiap tahun selaras pada peningkatan ebutan pembiayaan belanja negara.

UU No. 28 tahun 2009 yang berisi pajak serta retribusi daerah yang bisa membuka peluang untuk setiap daerah untuk lebih mengembangkan selaras pada apa yang akan direncanakan dengan prioritas masing-masing daerah. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah pada pengenaan pajak serta retribusi daerah memiliki harapan bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah terutama yang bersumber melalui pajak daerah

yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, tetapi setiap daerah berhak memungut pajak kendaraan bermotor karena lebih memudahkan masyarakat dalam membayar kewajibannya di setiap daerah. Pajak sangat mempengaruhi bagi pendapatan asli daerah diperlukan upaya yang lebih banyak agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Ketaatan WP dipengaruhi oleh sistem pengelolaan pajak, pelayanan kepada masyarakat, tarif yang dikenakan, dan penegakan hukum.

Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar merupakan tempat pelayanan umum untuk membayar pajak dan senantiasa menjalankan bermacam-macam langkah pada bidang pelayanan publik melalui strategi yang dilakukan guna memberikan pelayanan yang optimal. Kabupaten Karanganyar memiliki jumlah pengguna kendaraan bermotor yang relative banyak tentunya dapat memiliki potensi dalam memaksimalkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan online SAMSAT yang disebut E-Sakpole adalah terobosan yang dibuat dalam pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak yang bisa dilakukan secara online dimanapun. Petugas pajak memberikan layanan berkualitas tinggi yang akan menghasilkan kesenangan dan kepuasan, yang dapat memotivasi dan ketaatan WP. Menurut Kanit Regident Satlantas Polres Karanganyar, Iptu Ahmad Riedwan Prevoost mengatakan pemilik kendaraan bermotor rata-rata melakukan keterlambatan membayar pajak karena lupa. Pelanggaran ini ditunjukkan dengan adanya operasi gabungan penertiban kendaraan bermotor, (TribunJateng.com, 24/09/2019).

Tabel 1.
Data WP yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar 2017-2019

Tahun	Jumlah WP	WP yang Menunggak
2017	444.552	65.238
2018	473.572	77.286
2019	503.020	96.994

Sumber: SAMSAT Kabupaten Karanganyar

Tabel 1 menunjukkan tahun 2017 WP yang menunggak sejumlah 65.238, di tahun 2018 mengalami kenaikan WP yang menunggak menjadi 77.286 dan di tahun 2019 kembali mengalami kenaikan WP yang menunggak menjadi sejumlah 96.994. Ketaatan WP yang masih kurang dapat di lihat dari tabel diatas yang kian mengalami peningkatan jumlah WP yang menunggak di Kabupaten Karanganyar. Permasalahan dalam kepatuhan WP apabila tidak dilakukan penanganan secara cepat bisa menimbulkan menurunnya tingkat pendapatan asli daerah. Upaya yang dilakukan untuk mencegah menurunnya tingkat penerimaan negara dengan meningkatkan

ketaatan WP antara lain dengan memperhatikan faktor kesadaran WP, memberikan sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik serta tingkat penghasilan. Kesadaran WP terlihat melalui seseorang memenuhi kewajibannya dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya dalam membayar pajak dan mengetahui dengan jelas akan fungsi pajak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak masih sangat terbatas. Masyarakat yang memiliki rasa sadar akan pentingnya membayar pajak tanpa ada rasa terpaksa akan meningkatkan ketaatan WP tetapi masih banyak masyarakat yang membayar pajak dengan rasa terpaksa maka masih sulit mencapai target apa yang diharapkan. Kesadaran WP adalah sebuah situasi memahami atau mengetahui adanya perihal pajak tanpa merasa dipaksa oleh orang lain (Wardani & Rumiya, 2017).

Sosialisasi Perpajakan berperan penting dalam memberikan informasi kepada WP agar mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan melalui prosedur yang benar. Sosialisasi perpajakan akan memberikan informasi kepada WP bahwa pentingnya dalam memenuhi kewajibannya. WP semakin banyak yang disosialisasikan dari pemerintah, sehingga ketaatan WP akan kian mengalami peningkatan, karena konteks tersebut akan membuka wawasan WP tentang pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan publik yang dijalankan oleh petugas pelayanan pajak kepada masyarakat harus memberikan kesan yang baik dan ramah agar membuat stigma baik di mata masyarakat. Petugas harus melayani dengan prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan. Masyarakat yang merasakan kepuasan dalam layanan yang diberikan petugas akan merasa diperlakukan sebanding dengan apa yang dikeluarkan dalam membayar kewajibannya. Penelitian yang sebelumnya menyimpulkan hasil bahwa kepatuhan WP dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas pelayanan publik (Marsita, 2019). Penelitian lain memaparkan bahwa kepatuhan WP tidak dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas pelayanan publik (Aswati dkk, 2018).

Tingkat penghasilan adalah faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan WP, karena dengan WP dengan penghasilan yang dimiliki akan mampu memberikan pengaruh bagi perilaku orang untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajak. Penghasilan yang didapat dari seseorang dapat memberikan pengaruh bagi dalam membayar pajak semakin berpenghasilan tinggi maka akan lebih mudah membayar sedangkan jika berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang. Masyarakat harus lebih bijak dalam mengelola penghasilan yang didapat agar bisa memenuhi kebutuhan dan membayar kewajibannya.

Penelitian dari Aswati, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi dengan cara positif oleh kesadaran WP serta sosialisasi WP namun tidak dengan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian lainnya Bulan, dkk (2020)

menunjukkan bahwa kesadaran WP serta akuntabilitas pelayanan publik memberikan pengaruh pada kepatuhan WP.

Penelitian yang dijalankan didasarkan dalam fenomena WP kendaraan bermotor yang tercatat pada SAMSAT Karanganyar pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan WP yang melakukan penunggakan semasa melakukan pembayaran kewajiban perpajakan. Tujuan penelitian yang dijalankan adalah guna menganalisa dampak kesadaran WP, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik serta tingkat penghasilan terhadap kepatuhan WP. Fenomena dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu faktor apa saja yang bisa memberikan pengaruh bagi kepatuhan WP semasa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Karanganyar.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat pada kas negara yang diatur dalam UU (yang bersifat memaksa) secara tidak langsung memperoleh timbak balik serta dipakai guna melakukan pembayaran pengeluaran negara (Mardiasmo, 2018). Penguasa dapat melakukan pemotongan pajak yang didasarkan dengan peraturan hukum guna mengeluarkan biaya produksi serta jasa agar diperoleh kesejahteraan umum. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara yang diatur dalam UU secara tidak memperoleh balas jasa dengan cara langsung serta bersifat memaksa (Widyaningsih, 2011).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pengenaan pajak yang dipotong mengenai dasar kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang dibayar oleh pemilik setiap tahunnya. Kendaraan Bermotor merupakan kendaraan yang diberi energi melalui mesin dan digunakan untuk transportasi darat, serta dipergerakan melalui peralatan teknis berbentuk motor listrik maupun alat lain yang mempunyai fungsi melakukan pengubahan sebuah sumber energi kepada tenaga untuk menggerakkan kendaraan (Aswati dkk, 2018). Pajak kendaraan bermotor memiliki manfaat bagi daerah yaitu:

1. Sumber pendapatan daerah.
2. Mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan dan peningkatan sarana transportasi umum untuk masyarakat.
4. Dapat membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota .
5. Berguna untuk meningkatkan kepastian hukum dan ketenangan bagi WP.

Kepatuhan WP

Kepatuhan WP merupakan tindakan WP yang menjalankan selaras pada peraturan perpajakan dan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak selaras pada peraturan yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Kepatuhan dalam perpajakan yaitu suatu sikap taat dan tunduk melakukan ketentuan selaras pada peraturan perpajakan (Marsita, 2019). Kepatuhan perpajakan dapat tergolong kedalam dua yakni kepatuhan formal serta kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan ketaatan WP dalam menaati ketentuan material perpajakan. Kepatuhan formal adalah syarat WP dalam menaati peraturan formal perpajakan (Rahayu, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah sikap yang mempunyai niat positif individu guna memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa oleh pihak manapun (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kesadaran Wajib Pajak terlihat oleh keseriusan WP dalam melaksanakan kewajiban secara sukarela tanpa adanya pengaruh atau dorongan dari pihak lain. Seseorang hanya mengetahuinya berarti tingkat kesadaran yang dimiliki masih kurang karena harus memahami dan melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak harus selalu diajak untuk mengahui, menghargai, mengakui dan menaati peraturan perpajakan (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018). Kesadaran wajib pajak kian mengalami peningkatan sehingga akan semakin baik pemahaman dan pelaksanaan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Pada penelitian Kowel dkk., (2019), Aswati dkk., (2018), Bulan dkk., (2020) dan Wardani dkk., (2017) memaparkan kepatuhan WP dipengaruhi dengan cara signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Dari pernyataan itu bisa disusun hipotesis diantaranya:

H₁ : Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan WP.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yaitu salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menyajikan pengertian serta wawasan bagi masyarakat terutama WP untuk memahami perpajakan melalui prosedur yang tepat. (Marsita, 2019). Perpajakan disosialisasikan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran WP. Kegiatan yang akan dilakukan secara efektif melalui penggunaan media lain yang lebih dikenal luas. Peran pemerintah diperlukan agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak melalui konsultasi atau sosialisasi yang rutin. (Marsita, 2019). Penyuluhan perpajakan dapat diarahkan pada 3 sasaran utama, yaitu pebayar pajak terdaftar, baru terdaftar dan calon pebayar pajak (Subroto, 2020). Penyuluhan dilakukan menggunakan media cetak, elektronik, dan spanduk diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya perpajakan bagi negara dan meningkatkan ketaatan WP sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Penelitian Marsita (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Sosialisasi perpajakan dapat susun hipotesis diantaranya:

H₂ : Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kewajiban dalam menanggung tanggung jawab sejumlah pekerjaan bagi yang dijalankan oleh pemerintah (Marsita, 2019). Norma yang diakui, diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat merupakan tolak ukur akuntabilitas pelayanan publik. Norma tersebut mencakup prinsip keadilan, transparansi keadilan, jaminan penegakan hukum, HAM dan orientasi pada layanan umum terhadap masyarakat pengguna jasa. Akuntabilitas pelayanan publik dibagi menjadi 2 tipe yaitu (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018):

1. Pertanggungjawaban vertical yang berarti tanggung jawab pengelola dana oleh yang lebih tinggi, contohnya pemerintah daerah bertanggungjawab untuk pemerintah pusat.
2. Pertanggungjawaban horizontal berarti bertanggungjawab untuk kepada masyarakat.

Menurut Marsita (2019) dan Yunita, Kurniawan, & Diatmika (2017) memaparkan kepatuhan WP dipengaruhi positif oleh akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian dari Aswati, Mas'ud, & Nudi (2018) memaparkan bahwa kepatuhan WP tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan WP. Dari pernyataan tersebut bisa dilakukan penyusunan seperti:

H₃ : Akuntabilitas Pelayanan Publik memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

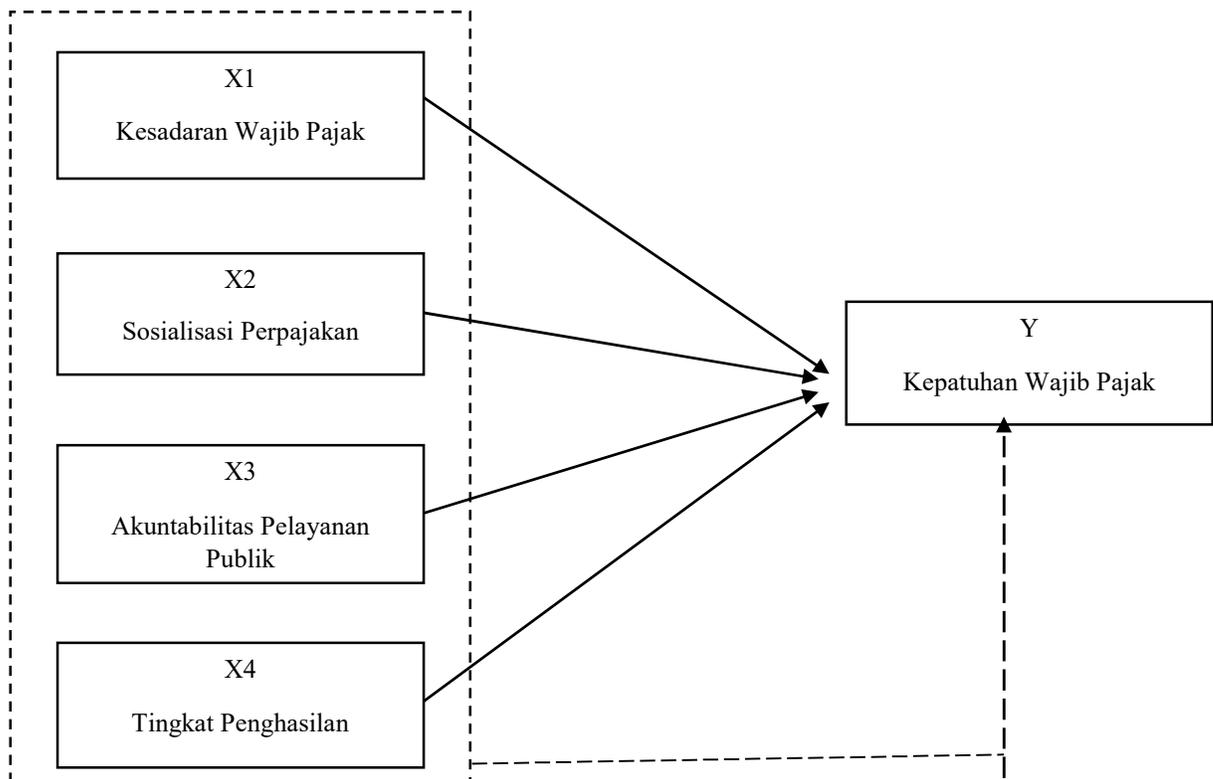
Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan adalah faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan WP, karena dengan wajib pajak dengan penghasilan yang dimiliki akan mampu memberikan pengaruh bagi perilaku orang untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajak. Penghasilan yang didapat dari seseorang dapat memberikan pengaruh bagi dalam membayar pajak semakin berpenghasilan tinggi maka akan lebih mudah membayar sedangkan jika berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang. Tingkat penghasilan seseorang dapat memberikan pengaruh bagi dalam pemahaman dan ketaatan ketentuan hukum dan kewajiban membayar pajak. Mengidentifikasi faktor keuangan sebagai sumber tekanan bagi wajib pajak dengan penghasilan terbatas memungkinkan akan menghindari pajak karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan (Yanti,

2018). Pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus tetap melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak bisa dipantau melalui kondisi keuangan atau tingkat penghasilan seseorang. Kepatuhan WP bisa dilihat dari tingkat penghasilan, karena wajib pajak memiliki penghasilan yang dimiliki akan mampu memberikan pengaruh bagi perilaku orang untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajak. Menurut Syah dkk., (2017) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa tingkat penghasilan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Tingkat penghasilan dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Tingkat Penghasilan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dipakai kuisisioner (angket). Kuisisioner yaitu teknik mengumpulkan data melalui pemberian pernyataan maupun pertanyaan yang ditulis bagi responden guna diberikan jawaban (Sugiyono, 2016). Penelitian menggunakan kuisisioner untuk mengambil sampel dari populasi dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Jenis data pada penelitian yang dijalankan merupakan

data kuantitatif yakni data berupa numerik yang bisa dianalisis secara prosedur statistik (Sugiyono, 2017). Sumber data yang dipakai pada penelitian yang dijalankan yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dihimpun serta dilakukan pengolahan mandiri oleh sebuah organisasi maupun individu langsung melalui objeknya (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data dijalankan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner pada responden. Populasi pada penelitian yang dijalankan totalnya 503.020 wajib pajak selaras pada data SAMSAT Kabupaten Karanganyar Tahun 2019. Jumlah wajib pajak yang merupakan sampel merupakan 100 WP melalui penggunaan metode *purposive sampling*. Kriteria penelitian yang dijalankan yaitu pemilik kendaraan bermotor merupakan milik pribadi serta wajib pajak yang mengurus pajak sendiri pada Kantor Samsat Karanganyar.

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian yang dijalankan yakni uji instrument tersusun atas uji validitas serta reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas serta heterokedasitsitas. Pengujian hipotesis melalui pemakaian analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*), uji t, serta uji f.

Definisi Variabel dan Pengukuran

1. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini merupakan kepatuhan WP. Kepatuhan wajib pajak yaitu sikap menaati peraturan perpajakan dan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya selaras pada peraturan yang berlaku (Wardani & Asis, 2017). Penelitian ini menggunakan indikator (Wardani & Rumiya, 2017):
 - a. Membayar pajak selaras pada peraturan.
 - b. Membayar pajak tepat waktu.
 - c. Persyaratan dalam membayar pajak harus dipenuhi.
 - d. WP mengetahui batas waktu pembayaran.
2. Variabel independen (X) yakni variabel yang merupakan dampak perubahannya maupun timbulnya variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas:
 - a. Kesadaran WP merupakan sikap didalam manusia untuk dapat mengetahui realita dan mengetahui cara untuk menyikapinya (Anam dkk, 2018). Penelitian ini menggunakan indikator (Wardani & Rumiya, 2017):
 1. Sadar akan hak dan kewajiban membayar pajak sesiaio dengan peraturan.
 2. Masyarakat percaya bahwa pajak untuk pembiayaan Negara dan Daerah.
 3. Tidak ada paksaan dalam membayar pajak.

4. Pajak adalah sumber pendapatan negara.
- b. Sosialisasi perpajakan adalah proses untuk menghasilkan partisipasi dengan cara berfikir, belajar dan bertindak (Wurianti dkk, 2015).). Penelitian ini menggunakan indikator (Wirenungan, 2013):
 1. Penyuluhan.
 2. Diskusi dengan masyarakat.
 3. Petugas menyampaikan informasi langsung kepada WP.
 4. Akses Website Ditjen pajak.
- c. Akuntabilitas pelayanan publik adalah kewajiban dalam mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada publik yang dijalankan oleh pemerintah (Marsita, 2019). Penelitian ini menggunakan indikator (Mahaputri, 2016):
 1. Petugas sigap dalam menanggapi kepentingan.
 2. Prosedur yang mudah serta tepat pada pemberian layanan.
 3. Pelayanan andal dan valid.
 4. Informasi yang disampaikan benar.
- d. Tingkat penghasilan yaitu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan WP, karena dengan wajib pajak memiliki penghasilan yang dimiliki akan mampu memberikan pengaruh bagi perilaku orang untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajak. Penelitian ini menggunakan indikator (Sari, 2013):
 1. Pendapatan rendah tetap membayar pajak.
 2. Jumlah pajak yang dikenakan tidak memberikan pengaruh bagi dalam membayar pajak.
 3. Sanggup membayar pajak.
 4. Pendapatan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban.

HASIL DAN ANALISIS

Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 100 orang yang didapatkan memakai metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan sampel berupa kendaraan bermotor yang masuk kedalam kriteria yang telah ditentukan. Karakteristik koresponen pada penelitian ini merupakan jenis kelamin, umur, tahap pendidikan serta jenis kendaraan. Responden selaras pada jenis kelamin responden sejumlah 47 orang adalah laki-laki dan 53 orang adalah perempuan. Usia responden yang dipakai pada penelitian ini berusia > 21 tahun sejumlah 2 orang, 21- 30 tahun sejumlah 56 orang, 31- 40 tahun sejumlah 26 orang dan lebih dari 50 tahun sejumlah 16 orang. Tingkat pendidikan responden paling banyak SMA/SMK sebanyak 60 orang, kemudian Sarjana/Diploma sejumlah 27 orang, SMP sejumlah 8 orang

serta SD sejumlah 5 orang. Jenis kendaraan yang dipilih responden untuk roda dua sejumlah 74 responden dan roda empat 26 responden.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Tabel 2.
Hasil uji validitas

Variabel	item soal	r ^{tabel}	r ^{hitung}	keterangan
Kesadaran wajib pajak	1	.1654	.540	Valid
	2	.1654	.408	Valid
	3	.1654	.418	Valid
	4	.1654	.379	Valid
	5	.1654	.389	Valid
sosialisasi perpajakan	1	.1654	.333	Valid
	2	.1654	.283	Valid
	3	.1654	.351	Valid
	4	.1654	.404	Valid
	5	.1654	.468	Valid
akuntabilitas pelayanan public	1	.1654	.611	Valid
	2	.1654	.598	Valid
	3	.1654	.381	Valid
	4	.1654	.495	Valid
tingkat penghasilan	1	.1654	.506	Valid
	2	.1654	.537	Valid
	3	.1654	.482	Valid
	4	.1654	.373	Valid
kepatuhan wajib pajak	1	.1654	.477	Valid
	2	.1654	.515	Valid
	3	.1654	.539	Valid
	4	.1654	.482	Valid
	5	.1654	.249	Valid

Untuk memberikan gambaran kevalidan (ketepatan) item pertanyaan digunakan hasil uji validitas. Hasil uji ini akan dibandingkan dengan hasil uji r hitung dari masing-masing item dengan r tabel. Hasil uji disebutkan valid jika nilai r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar daripada r tabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Kriteria	<i>Crobranch Alpha</i>	Keterangan
X1	.60	.670	Reliabel
X2	.60	.601	Reliabel
X3	.60	.729	Reliabel
X4	.60	.685	Reliabel
Y	.60	.673	Reliabel

Untuk mengukur kekonsistenan jawaban terhadap item pertanyaan dilakukan uji reliabilitas dalam kuesioner. Mengukur reabilitas menggunakan uji statistik *Crobranch Alpha*. Data kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai *Crobranch Alpha* $\geq 0,60$. Hasil uji reabilitas diketahui nilai *Crobranch Alpha* dari setiap variabel $\geq 0,60$ sehingga disebutkan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.99854417
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.062
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji normalitas mempunyai tujuan guna mendeteksi normal maupun tidaknya sebuah distribusi data (Ghozali, 2016). Hasil penelitian ini berdistribusi normal karena hasil dalam tabel 4 memperlihatkan *Kolmogorov-Smirnov* nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sejumlah 0,20 melebihi 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.654	1.529
	X2	.530	1.886
	X3	.592	1.690
	X4	.671	1.491

Guna mendeteksi relasi antara variabel bebas yang mempunyai permasalahan gejala multikolinieritas maupun tidak dilakukan uji multikolinearitas. Hasil dari data diatas memiliki nilai *tolerance* variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik serta tingkat penghasilan memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga bisa dinyatakan mengenai antarvariabel bebas pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstand ardized Coefficie nts	Standardi zed Coefficien ts	t	Sig.	Collinearity Statistics	
					Toleranc e	VIF
(Constant)	4.503	1.272	3.539	.001		
X1	-.038	.059	-.078	.523	.654	1.529
X2	-.039	.071	-.074	.588	.530	1.886
X3	.020	.071	.035	.782	.592	1.690
X4	-.101	.060	-.201	.098	.671	1.491

a. Dependent Variable: RES_2

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan setiap variabel mempunyai nilai signifikansi > 0,05. Hasil penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas sebab semua variabel bebas menunjukkan hasil *sig.* > 0,05.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7.
Hasil uji analisis regresi linier berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.067	2.086		3.868	.000		
	X1	.194	.097	.206	1.993	.049	.654	1.529
	X2	.239	.116	.236	2.058	.042	.530	1.886
	X3	.056	.117	.052	.476	.635	.592	1.690
	X4	.226	.099	.234	2.292	.024	.671	1.491

Hasil analisis data pada tabel 6 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,067 + 0,097 X_1 + 0,239 X_2 + 0,056 X_3 + 0,226 X_4$$

Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. $\alpha = 8,067$ artinya kepatuhan WP akan bernilai positif jika kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan public dan tingkat penghasilan sama dengan nol.
- b. $\beta_1 = 0,097$ artinya setiap ada perubahan sejumlah satu pada kesadaran wajib pajak, maka akan diikuti kepatuhan WP sejumlah 0,097 dengan diasumsikan variabel lain tetap.
- c. $\beta_2 = 0,239$ artinya setiap ada perubahan sejumlah satu pada sosialisasi perpajakan, maka akan diikuti kepatuhan WP sejumlah 0,239 dengan diasumsikan variabel lain tetap.
- d. $\beta_3 = 0,056$ artinya setiap ada perubahan sejumlah satu pada akuntabilitas pelayanan publik, maka akan diikuti kepatuhan WP sejumlah 0,056 dengan diasumsikan variabel lain tetap.
- e. $\beta_4 = 0,226$ artinya setiap ada perubahan sejumlah satu pada tingkat penghasilan, maka akan diikuti kepatuhan WP sejumlah 0,226 dengan diasumsikan variabel lain tetap.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.580 ^a	.336	.309	2.040

Hasil uji koefisien determinasi bisa dilihat dari besarnya *adjusted R²* adalah 0,309. Variasi kepatuhan WP sejumlah 30,9 % yang dipengaruhi oleh empat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan tingkat penghasilan. Sisanya 69,1% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar dari penelitian ini.

Uji F

Tabel 9.
Hasil Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	200.536	4	50.134	12.045	.000 ^b
	Residual	395.424	95	4.162		
	Total	595.960	99			

Untuk mengetahui apakah variabel independent dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel dependen dapat digunakan hasil uji F. Nilai *sig.* < 0,05 maka keempat variabel independen mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F yaitu 0,00 < dari 0,05 artinya dapat disimpulkan variabel bebas memiliki pengaruh bersama-sama atau simultan pada kepatuhan WP di SAMSAT Kabupaten Karanganyar.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10.

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	8.067	2.086		3.868	.000
	X1	.194	.097	.206	1.993	.049
	X2	.239	.116	.236	2.058	.042
	X3	.056	.117	.052	.476	.635
	X4	.226	.099	.234	2.292	.024

Hasil uji t berdasarkan pada analisis tabel 10 bisa ditarik kesimpulan mengenai:

1. Nilai t variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah 1,993 dan nilai signifikansi $0,049 < 0,05$ maka hipotesis pertama diterima yang artinya kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP di kantor Samsat Kabupaten Karanganyar.
2. Nilai t variabel sosialisasi perpajakan (X2) adalah 2,058 dan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima yang artinya sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP di kantor Samsat Kabupaten Karanganyar.
3. Nilai t variabel akuntabilitas pelayanan publik (X3) adalah 0,476 dan nilai signifikansi $0,635 > 0,05$ sehingga hipotesis ketiga ditolak yang artinya akuntabilitas pelayanan publik tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP di kantor Samsat Kabupaten Karanganyar.
4. Nilai t variabel tingkat penghasilan (X4) adalah 2,292 dan nilai signifikansi $0,024 < 0,05$ sehingga hipotesis keempat diterima yang artinya tingkat penghasilan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP di kantor Samsat Kabupaten Karanganyar.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pada kepatuhan WP.

Hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil analisis data memberikan gambaran nilai koefisien regresi variabel kesadaran WP sejumlah 0,194 dengan nilai signifikan $0,049 < 0,05$ maka hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut bisa ditarik kesimpulan mengenai kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan

WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar kewajibannya, konteks tersebut menunjukkan menunjukkan tingkat kesadaran WP meningkat akan diimbangi dengan meningkatnya ketaatan WP kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini selaras pada penelitian terdahulu dari Aswati, dkk. (2018), Kowel, dkk (2019) dan Wardani (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan WP.

b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pada kepatuhan WP.

Kepatuhan WP dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh variabel sosialisasi perpajakan di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil analisis data memberikan gambaran nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sejumlah 0,239 dengan nilai signifikan $0,042 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib di SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Peran aktif pemerintah dalam sosialisasi khususnya dalam pajak kendaraan bermotor dapat membuka wawasan masyarakat. Wajib pajak mendapatkan sosialisasi perpajakan akan mengetahui pentingnya membayar pajak bagi negara. Hasil penelitian ini memberi dukungan penelitian sebelumnya dari Marsita (2019) yang menyimpulkan variabel sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada kepatuhan WP.

Kepatuhan WP dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi variabel akuntabilitas pelayanan publik di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil analisis data memberikan gambaran nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sejumlah 0,056 dengan nilai signifikan $0,635 > 0,05$ maka hipotesis ketiga ditolak. Hasil tersebut dapat mengindikasikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dari beberapa wajib pajak dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas kurang memuaskan tetapi wajib pajak tetap membayar pajak kendaraan demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat akan peraturan. Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas, transparan dan terbuka agar timbul rasa kepuasan dari wajib pajak. Penelitian ini tidak selaras pada penelitian terdahulu oleh marsita (2019) yang memaparkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian ini memberi dukungan penelitian terdahulu yaitu dari Aswati, dkk (2018) yang

menunjukkan akuntabilitas pelayanan publik tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP.

d. Pengaruh Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan WP.

Kepatuhan WP saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh variabel tingkat penghasilan di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil analisis data memberi gambaran nilai koefisien regresi variabel tingkat penghasilan sejumlah 0,226 dengan nilai signifikan $0,024 < 0,05$ maka hipotesis keempat diterima. Hasil tersebut bisa ditarik kesimpulan mengenai tingkat penghasilan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Tingkat penghasilan semakin tinggi sehingga dapat memberikan jaminan taat dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini selaras pada penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Syah Noerman, dkk (2017) yang memaparkan bahwa tingkat penghasilan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran WP memberikan pengaruh bagi kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Karanganyar yang berarti kian meningkat tingkat kesadarannya sehingga kian tinggi ketaatan WP. Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Karanganyar yang artinya semakin sering dilaksanakan sosialisasi maka meningkat ketaatan WP. Akuntabilitas pelayanan publik tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP saat melakukan pembayaran pajak kendaraan motor pada Kabupaten Karanganyar yang berarti kian meningkat tahap akuntabilitas pelayanan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP. Variabel tingkat penghasilan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Karanganyar. Kesadaran WP, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik serta tingkat penghasilan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor.

Saran

1. Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar diharapkan mensosialisasikan pajak mengenai perubahan aturan dan tarif dasar pengenaan PKB.
2. Penelitian ini mempunyai batasan terletak dalam jumlah sampel yang diteliti sedikit sehingga diharapkan untuk kedepannya memperbesar sampel. Penelitian berikutnya bisa menambah variabel lainnya.

Ucapan Terimakasih

1. Tuhan YME yang memberikan kemudahan dan kelacaran tiada henti kepada penulis. Terimakasih atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada penlis.
2. Bapak Arif Nugroho R, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah secara sabar membimbing dalam penyusun penelitian ini.
3. Semua pihak baik orang tua, adik, keluarga besar, sahabat, dan rekan-rekan sepembimbingan yang memberikan semangat serta motivasi kepada penulis agar menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- Anam, Mohammad Choirul dan Rita Andini dan Hartono. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fikus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)*. Journal Of Accounting.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. III, 27-39.
- Bulan, N. L., Husin, & Anto, L. O. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Kediri*. Jurnal Progres Ekonomi Pemabangunan (JPEP), 71-82.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Penerbit Undip.
- Ilamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara.2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualias Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol. 7, 4251-4260.

- Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi dan Naniek Noviari. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Junal Universitas Udayana vol 17.3.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsita, N. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar*. Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM), 50-101.
- Sari, R. V., & Susanti, N. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma*. Jurnal Review, 63-78.
- Subroto, G. (2020). *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, A. L., & Krisdiyawati. (2017). *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 65-77.
- Wardani D. K dan M. R Asis. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Paja, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 (1), 15-24.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung, Alfabeta.

- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fikus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Bitung*. Jurnal EMBA, vol. 1 no. 3.
- Wurianti, Exti Lusiani Efa. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4 no. 6
- Yanti, W. D. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Pulik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.